

PERAN JARINGAN KOMUNIKASI SEBAGAI ELEMEN PENTING DALAM PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI DI INDONESIA: *LITERATURE REVIEW*

The Role of Communication Networks as An Important Element in The Development of Farmer Corporations in Indonesia: A Literature Review

Shinta Anggreany^{1*}, Sumardjo², Djuara Lubis², Syahyuti³

¹BSIP Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian RI,
Jln. Panglima Batur Barat No. 4, Banjarbaru 70714, Indonesia

²Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor,
Jln. Raya Darmaga, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16002, Indonesia

³Badan Riset Inovasi Nasional, Jln. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12170, Indonesia

*Korespondensi penulis. E-mail: shintaanggreany@gmail.com

Naskah diterima: 4 Oktober 2023

Direvisi: 31 Oktober 2023

Disetujui terbit: 15 Januari 2024

ABSTRACT

Communication networks play a crucial role in shaping the capacity and collaboration among farmers and facilitating the spread of innovation and technology within agricultural communities. These networks also encourage a business-oriented approach among farmers, aiming for the prosperity of rural communities. However, despite the potential benefits, the utilization of communication networks for farmer corporation development falls short of government expectations. This article aims to explore the significance of communication networks in supporting the growth of farmer corporations in Indonesia, drawing insights from various studies. It highlights the importance of effective coordination among farmers, government, and stakeholders to maximize the potential of these networks. Specifically, the involvement of extension workers is emphasized to enhance information dissemination and improve farmers' capabilities. Moreover, fostering active dialogue and collaboration between farmers and stakeholders is crucial for the sustainable development of farmer corporations. By leveraging communication networks, stakeholders can collectively contribute to advancing agricultural practices and rural livelihoods in Indonesia.

Keywords: *communication, communication networks, farmer corporations, farmer organizations*

ABSTRAK

Jaringan komunikasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi peningkatan kapasitas petani, pengembangan korporasi petani serta penyebaran inovasi dan teknologi. Selain itu, jaringan komunikasi sangat penting untuk mendorong korporasi petani agar berorientasi bisnis dan mampu memberikan kesejahteraan bagi petani. Untuk mengembangkan korporasi petani, petani, pemerintah dan pemangku perlu mengoptimalkan peran jaringan komunikasi baik dari dalam maupun antar pemangku kepentingan. Namun demikian, pengembangan korporasi petani belum berjalan sesuai harapan. Jaringan komunikasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan korporasi petani. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis peran jaringan komunikasi sebagai salah satu hal penting dalam mendukung pengembangan korporasi petani di Indonesia dengan mengkaji beberapa studi dari literatur terkait. Berdasarkan tinjauan literatur, peneliti menemukan bahwa jaringan komunikasi memiliki peran yang signifikan dalam mendorong interaksi sosial dan pengembangan bisnis dalam korporasi petani. Hal ini akan berjalan dengan baik jika antar petani, pemerintah dan stakeholders terlibat serta saling berkoordinasi. Untuk memperkuat jaringan komunikasi antar petani, pemerintah dan stakeholders perlu mengaktifkan peran penyuluh untuk menyebarluaskan informasi guna meningkatkan kapasitas petani. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan peran jaringan komunikasi antar petani dan stakeholders melalui dialog dan kolaborasi aktif dalam mengembangkan korporasi petani saat ini dan juga di masa depan.

Kata kunci: *jaringan komunikasi, komunikasi, korporasi petani, organisasi petani*

PENDAHULUAN

Ciri pertanian Indonesia sebagian besar didominasi oleh kepemilikan lahan pertanian yang terbatas, praktek pertanian dalam skala kecil (*small farming*), serta pengelolaannya secara individual (Anandita dan Patria, 2017; Sjaf

et al. 2022). Pertanian skala kecil yang masih mengikuti pola pengelolaan tradisional menghadapi kesulitan dalam mencapai pertumbuhan dan terbatas pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sehingga belum mampu dijalankan secara komersial. Hal ini mengakibatkan berbagai kendala dalam pengembangan pertanian seperti sulitnya

mengembangkan pertanian berbasis bisnis yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Hal ini juga berpengaruh pada rendahnya tingkat adopsi teknologi dan skala usaha serta perekonomian rumah tangga petani sehingga. Akibatnya, secara tidak langsung, hal tersebut memengaruhi peningkatan produksi dan pendapatan, akses terhadap informasi, serta input produksi (Wang et al. 2021; Gebru et al. 2021).

Sebagian besar lahan pertanian yang sempit umumnya dikelola secara individu. Hal ini menyebabkan terhambatnya perkembangan sektor pertanian. Namun, apabila petani tergabung dalam sebuah wadah seperti organisasi petani, sangat memungkinkan para petani dapat mengembangkan skala usaha, memperoleh input produksi dari pemerintah, dan mendapatkan informasi pasar. Penggabungan secara kolektif ke dalam organisasi petani juga dapat memperkuat aspek bisnis yang dilakukan secara bersama-sama. Salah satunya adalah pembentukan kelembagaan agribisnis berbasis kawasan, seperti korporasi petani, yang pada praktiknya dapat meningkatkan aspek ekonomi dan skala teknis (*economic of scale*) dari usaha tani. Dengan demikian, pertanian kecil individual sangat berpotensi untuk berkembang dengan membentuk organisasi berupa korporasi yang berbasis komunitas dan bergerak secara kolektif (Hisano et al. 2018).

Pengembangan pertanian dari usaha tani individu ke usaha tani yang berorientasi bisnis difokuskan dengan membentuk korporasi petani. Adanya korporasi petani diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, menambah pengetahuan, mempermudah petani memperoleh modal kerja, memperlancar penjualan hasil panen untuk mengoptimalkan hasil produksi, serta mengembangkan bisnis pertanian yang berkelanjutan (Werti et al. 2020; Mariyani et al. 2022). Karenanya, penguatan organisasi petani menjadi salah satu hal penting dalam mengembangkan usaha tani di tengah berbagai persoalan seperti lemahnya peran organisasi petani itu sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penghasilan petani melalui lembaga komersial berkelanjutan dengan kepemilikan bersama melalui korporasi (Haryanto et al. 2022). Dengan demikian, korporasi petani diharapkan bisa menjadi kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, sehingga dirancang sebagai penggerak ekonomi kawasan (Gultom et al. 2020).

Dalam penguatan organisasi dan pengembangan korporasi petani, aspek komunikasi sangat menentukan. Dalam

penelitian Haryanto et al. (2022) terkait upaya pengembangan korporasi petani di Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa korporasi petani yang telah dibentuk belum mampu berperan optimal dalam mengatasi kesenjangan ekonomi petani di perdesaan. Hal tersebut berimplikasi pada rendahnya performa kelembagaan petani dan lemahnya kapasitas organisasi. Apabila permasalahan dalam korporasi petani tidak diselesaikan dengan baik, maka petani akan mengalami tersendatnya komunikasi yang berdampak pada buruknya kerjasama dan kurangnya koordinasi dalam korporasi petani (Harjanto et al. 2022; Haryanto et al. 2022). Artinya, secara keseluruhan korporasi petani dianggap belum mampu menjadi organisasi yang membantu petani untuk mengakses bisnis di bidang pertanian yang akan mengantarkan petani untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dikarenakan korporasi petani belum sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak dalam mewujudkan usaha tani berskala ekonomi, berorientasi pasar dan berbasis kawasan. Oleh karena itu, perlu penguatan organisasi dari aspek komunikasi agar korporasi petani dapat berjalan sesuai harapan.

Gandasari et al. (2015) berpendapat bahwa sebuah organisasi akan kuat apabila komunikasi antar organisasinya berlangsung efektif. Sebaliknya, apabila terdapat kendala dalam komunikasi maka hal itu akan memengaruhi korporasi petani. Komunikasi juga mampu membentuk jaringan antar petani yang dapat memengaruhi komunikasi yang berlangsung antar petani tersebut. Penelitian Setyani et al. (2021) mengatakan bahwa komunikasi yang terjadi menjadi kurang erat serta hanya didominasi oleh orang-orang tertentu apabila anggota petani tidak tergabung dalam klik (kelompok kecil yang terdiri dari beberapa anggota) pada kelompoknya. Hal ini mengakibatkan komunikasi diartikan sebagai suatu proses yang dinamis dan di dalamnya terjadi interaksi yang terdiri dari beberapa unsur. Unsur dalam komunikasi tersebut terdiri dari sumber, penerima, pesan, saluran, akibat, dan umpan balik (Flor et al. 2022). Unsur tersebut saling memengaruhi dan berkaitan satu dengan lainnya. Dari aspek komunikasi dapat dikatakan bahwa penyebaran informasi melalui komunikasi dapat mempercepat proses pembangunan di perdesaan dan mendorong perubahan sosial (Lubis 2015). Hal ini dipertegas oleh pendapat Servaes dan Lie (2008) yang menjelaskan bahwa komunikasi dan keterlibatan masyarakat adalah dua faktor utama keberhasilan dan kegagalan program pembangunan.

Jaringan komunikasi dapat memengaruhi kapasitas petani dan menjadi salah satu sumber informasi yang paling efektif bagi petani (Crawford et al. 2015; Wahyuni et al. 2017). Dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah faktor penting dalam proses peningkatan kapasitas, keterikatan, relasi, dan interaksi dalam sebuah organisasi petani. Jaringan komunikasi yang terjadi di dalam dan luar kelompok berguna dalam menyusun strategi pembangunan agribisnis (Andriani et al. 2021). Jaringan komunikasi penting diamati agar dapat memahami fenomena interaksi manusia secara umum dalam sebuah sistem sosial, sehingga dapat juga mengidentifikasi struktur komunikasi yang menyusunnnya (Rogers, Kincaid. 1981). Kenyataan ini berarti bahwa jaringan komunikasi merupakan suatu hal yang penting dan berpengaruh terhadap kapasitas petani dan jumlah anggota kelompok dalam proses diseminasi inovasi dan teknologi (Wahyuni et al. 2017; Sulistiawati, 2018). Bahkan, jaringan komunikasi dapat memengaruhi petani dalam mengumpulkan informasi tentang usaha tani karena dapat menyampaikan informasi tentang pertanian melalui interaksi sosial yang dilakukan oleh petani (Pratiwi dan Suzuki 2017).

Littlejohn dan Foss (2018) menyebutkan bahwa terdapat beberapa fungsi kerja jaringan dalam sebuah organisasi secara umum, yaitu (1) mengontrol arus informasi; (2) menyatukan orang-orang dengan kepentingan yang sama; (3) membangun kesamaan interpretasi; (4) meningkatkan pengaruh sosial; dan (5) memungkinkan pertukaran sumber daya. Pendapat ini mempertegas bahwa dalam organisasi petani, jaringan komunikasi merupakan salah satu hal penting yang perlu dipetakan, baik struktur maupun peran keterlibatan petani dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui jaringan komunikasi yang telah dipetakan tersebut dapat mempermudah proses pengembangan organisasi petani ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, riset Rangkuti (2009) menyebutkan bahwa jaringan komunikasi sangat diperlukan dalam membangun pertanian yang efektif dan efisien. Artinya, jaringan komunikasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengembangan suatu komunitas (Sari et al. 2021).

Tulisan ini bertujuan menyampaikan hasil revidu tentang jaringan komunikasi organisasi sebagai elemen penting yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan, operasionalisasi, dan keberlanjutan korporasi petani. Tulisan ini akan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan penelitian yang relevan dalam suatu bidang atau topik tertentu. Metode

penulisan dilakukan dengan *literature review* dari penelaahan jurnal bereputasi. Selanjutnya, dibatasi hanya jurnal yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada (Snyder 2019).

KORPORASI PETANI

Konsep dan Implementasi Korporasi Petani di Indonesia

Regulasi tentang pembangunan pertanian nasional berupa pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani tertuang dalam berbagai peraturan menteri dan perundang-undangan. Dalam prakteknya, upaya ini sejalan dengan amanat Pancasila, yaitu menerapkan nilai-nilai gotong royong, sistem kekeluargaan, mandiri, dan berkeadilan serta bersifat dinamis. Pelaksanaan korporasi dilandasi oleh beberapa regulasi antara lain adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

Korporasi petani merupakan sebuah terminologi baru dalam pendekatan pemberdayaan petani. Melalui korporasi, petani memiliki wadah mengembangkan diri secara bersama-sama, sehingga lebih berdaya saing dan berorientasi bisnis. Hal ini dikarenakan di dalam korporasi terdapat badan usaha yang dikelola secara bersama-sama dalam suatu kawasan yang luas serta membawahi beberapa organisasi petani seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang tergabung di dalamnya. Dalam prakteknya korporasi petani melakukan konsolidasi antar petani, Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang dikelola dengan manajemen profesional, sehingga menjadi penggerak ekonomi dan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern (Gultom et al. 2020; Syahyuti et al. 2020).

Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020–2024. Selanjutnya, terdapat pula pada Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang diimplementasikan melalui Penguatan Jaminan Usaha serta rencana penumbuhan 350 korporasi petani dan nelayan di tahun 2024. Menyambut hal tersebut, Kementerian Pertanian melalui program pengembangan korporasi petani bermaksud untuk turut serta dalam upaya mewujudkan kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bahkan, di dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tujuan dari Korporasi Petani adalah:

1. Meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
2. Memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan.
3. Memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan, serta pengolahan dan pemasaran.

Di dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2018 disebutkan bahwa korporasi petani adalah KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani), berbadan hukum, berbentuk koperasi, atau badan hukum lain yang sebagian besar modal dimiliki oleh petani serta merupakan satu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani dalam upaya merestorasi jiwa gotong royong petani. Dalam perkembangannya, korporasi petani dinilai dapat berperan meningkatkan daya saing serta produktivitas dan pendapatan petani, bahkan mampu menekan harga sarana produksi (Iskandar dan Jamhari 2020; Werti et al. 2020). Dalam hal ini, korporasi petani dirancang sedemikian rupa agar adaptif dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan menekankan pada nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia secara umum.

Korporasi petani menghimpun kelompok-kelompok tani untuk dapat saling terkoneksi dan berkolaborasi. Pada awalnya, kelompok tani dibentuk berdasarkan tujuan yang kuat serta didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam membangun dan memperluas kemitraan. Kemudian, aset yang dimiliki dari anggota sebagai modal awal, cenderung akan berkembang dengan cepat dan berhasil. Namun, kondisi di lapangan banyak kelompok tani yang dibentuk dengan tujuan yang sama namun tidak memiliki modal, keterampilan, dan aset usaha. Oleh karena itu, petani memerlukan pemberdayaan yang maksimal dengan berbagai cara yang tepat, seperti pendampingan dalam mengelola organisasi dan pendampingan dalam

mengumpulkan aset usaha dan modal usaha. Pendekatan yang harus dilakukan untuk mentransformasi kelompok tani maju menjadi korporasi petani adalah dengan pengembangan berbasis kawasan (Tan dan Mailena 2021). Dalam hal ini, petani juga hendaknya memiliki keinginan untuk mengembangkan kelompoknya menjadi lebih besar dan berbasis bisnis, sehingga dapat bergerak bersama-sama dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya.

Pada saat ini, pengembangan korporasi petani menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan korporasi petani harus didukung oleh tenaga terampil yang berorientasi pasar (Tan dan Mailena 2021). Hal ini juga diungkapkan oleh Syahyuti et al. (2020) bahwa pembentukan korporasi petani bertujuan agar KEP dapat mendorong pemberdayaan petani, meningkatkan nilai tambah dan memperkuat kelembagaan petani, sarana dan prasarana, akses terhadap teknologi, permodalan, pengelolaan, dan pemasaran. Keberadaan korporasi diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan petani seperti pada penyediaan benih, proses produksi, ketersediaan alat dan mesin pertanian, hingga pemasaran. Dengan adanya korporasi, fungsi kawasan pertanian diharapkan menjadi lebih optimal, baik dari hulu hingga hilir.

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian melalui pilot proyek merealisasikan pembentukan korporasi petani di berbagai daerah, yaitu (1) Kabupaten Lebak, Banten (Korporasi Jagung); (2) Kabupaten Subang, Jawa Barat (Korporasi Sapi Potong); (3) Kabupaten Malang, Jawa Timur (Korporasi Bawang Merah); (4) Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Korporasi Kakao); (5) Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Korporasi padi yang diintegrasikan dengan itik dan sayuran) (Luna, 2020). Dari seluruh korporasi yang dikembangkan di tahun 2018, Kabupaten Karawang menjadi korporasi yang terdiri dari tiga komoditas yaitu pangan, hortikultura dan itik. Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian mengembangkan *Food Estate* di Kalimantan Tengah dengan pembentukan korporasi petani dan diperkenalkan pula penerapan mekanisasi modern, digitalisasi, sistem manajemen untuk pengembangan korporasi petani (Fahmid et al. 2022). Penelitian ini juga mengungkap bahwa pendekatan yang digunakan untuk program *Food Estate* adalah sistem pertanian berskala besar dengan sistem *cluster* dan multi komoditas dalam satu sistem rantai nilai produksi. Selain terintegrasi baik *on-farm* dan *off-farm*, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan

sistem agribisnis perdesaan yang berkelanjutan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal.

Agar dapat diterima oleh petani, penerapan korporasi petani dapat dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi dan aspek produksi. Penelitian Iskandar dan Jamhari (2020) mengungkapkan bahwa faktor produksi seperti luas lahan, pestisida, dan tenaga kerja dapat meningkatkan produksi padi di lokasi korporasi petani. Penelitian ini juga membantu untuk memahami bahwa fokus pengembangan korporasi di Indonesia bukan hanya bertumpu pada pengembangan organisasi petani semata, namun dapat berupa peningkatan *skill* atau keahlian petani dari berbagai aspek lainnya. Beberapa hal perlu ditingkatkan melalui faktor produksi, seperti luas lahan, penggunaan pestisida yang ramah lingkungan, dan penggunaan tenaga kerja yang efektif dalam mengelola usaha tani. Aspek teknis ini harus diperhatikan untuk membantu pengembangan korporasi agar dapat berlanjut dan menguntungkan petani dari aspek budidaya.

Korporasi yang dikelola oleh Gapoktan biasanya disertai berbagai kegiatan seperti pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Oleh karena itu, dengan adanya korporasi petani, diharapkan petani mampu menjadi pelaku utama dalam sistem agribisnis, meningkatkan posisi tawar dan kemampuan secara teknis, manajemen, serta ekonomi (Suharyono et al. 2021). Dari segi pengembangan organisasi petani, korporasi petani perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagai upaya pengembangan korporasi petani itu sendiri. Keberadaan korporasi hendaknya berdampak pada peningkatan kapasitas anggota walaupun pada kenyataannya korporasi belum berperan optimal.

Penelitian Pratiwi et al. (2022) mengungkapkan bahwa dalam kegiatan korporasi petani, petani masih melakukan aktivitas sebagai individu yang hanya bertanggung jawab atas tanah garapannya. Hal ini dikarenakan petani sulit mengubah pola pengelolaan usaha tani tradisional yang telah dilakukannya selama ini. Aktivitas ini dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan sesuai dengan yang tertuang dalam *Grand Design* Korporasi Petani. Aktivitas individu yang dilakukan petani dalam korporasi menyebabkan lemahnya dukungan kelembagaan untuk penyediaan modal, sarana produksi, pemasaran, serta aksesibilitas kawasan korporasi (Nisma et al. 2017; Effendy dan Mustofa 2020; Pratiwi et al. 2022). Berbagai permasalahan yang menyebabkan korporasi tidak berjalan secara

optimal tersebut dapat menghambat pengembangan korporasi apabila tidak segera diatasi.

KOMUNIKASI, ORGANISASI DAN JARINGAN KOMUNIKASI

Komunikasi dan Organisasi

Ramadhani dan Prihantoro (2020) menjelaskan bahwa komunikasi memiliki dampak pada perilaku, kesejahteraan, dan perkembangan ke arah yang lebih maju. Oleh karena itu, komunikasi menjadi bagian penting dalam upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, searah dengan tujuan pembangunan. Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi secara terus menerus dan timbal balik dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Simamora 2021). Lebih lanjut, Amalia et al. (2017) menegaskan bahwa frekuensi berkomunikasi dalam organisasi dapat memengaruhi berbagai hal krusial dalam organisasi seperti kualitas kerja, kerja sama, dan ketepatan waktu pendamping dalam bekerja, serta kemampuan dialog yang baik. Namun, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi anggota pada aksi kolektif yang tinggi tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan berdialog yang baik dan kesempatan mengekspresikan aspirasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kemampuan berdialog dan berkomunikasi dalam organisasi adalah hal penting dalam menunjang kualitas kerja dan kerjasama dalam organisasi, namun belum tentu dapat meningkatkan partisipasi petani dalam organisasi.

Hal ini memperlihatkan adanya hubungan dengan komunikasi, dialog, dan penyampaian informasi sekaligus merupakan bagian penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Hal yang sama disampaikan oleh Yulida et al. (2021) bahwa peran komunikasi dari segala arah dapat memunculkan adanya interaksi yang menyebar, sehingga terjadi komunikasi dari beberapa pihak. Komunikasi antar pihak yang saling berinteraksi bisa membuat suatu perubahan dalam organisasi, dalam beberapa hal sering disebut dengan komunikasi multipihak. Organisasi akan berkembang maju apabila dapat menjaga komunikasi di dalam maupun di luar organisasinya, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, apabila komunikasi dalam organisasi terganggu, maka akan berdampak pada terhambatnya

proses perubahan organisasi ke arah yang lebih baik.

Pada organisasi di bidang pertanian yang merupakan organisasi non formal, seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dapat menjadi wadah belajar bagi petani. Selain fungsi tersebut, Bakri et al. (2020) menyebutkan bahwa organisasi petani juga berfungsi untuk menerima subsidi pemerintah, baik berupa alat produksi maupun mesin pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi petani berperan penting sebagai wadah berkumpul petani untuk menerima inovasi baru melalui kegiatan penyuluhan dan berbagai kegiatan lainnya. Beberapa istilah dalam organisasi petani seringkali menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam memahaminya. Istilah dalam organisasi petani, yaitu KEP, korporasi petani, koperasi, poktan, dan gapoktan dijelaskan sebagai berikut (Haryanto dan Yuniarti 2023; Syahyuti 2014).

1. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah sebuah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani. Tujuan utama dari KEP dapat meningkatkan kesejahteraan petani, mengembangkan infrastruktur pertanian, memperkuat posisi tawar petani, dan keberlanjutan lingkungan. KEP bisa berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan dapat beranggotakan petani, pengusaha, dan mitra bisnis.
2. Korporasi Petani adalah KEP yang bisa berbentuk koperasi atau badan hukum lain yang kepemilikan modal sebagian besar dimiliki oleh petani yang berbasis kawasan. Tujuannya adalah memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan; memperkuat organisasi petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan, serta pengolahan dan pemasaran. Korporasi petani berbadan hukum dengan anggota petani yang tergabung di dalam Poktan/Gapoktan/Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), Kelompok Usaha Bersama (KUB).
3. Koperasi adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh orang perseorangan dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada petani untuk mengembangkan usaha taninya, memberdayakan poktan dan gapoktan dalam

mengembangkan usaha agribisnisnya, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya, serta meningkatkan perekonomian di perdesaan. Koperasi berbadan hukum dapat beranggota petani maupun masyarakat umum.

4. Kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Tujuannya adalah sebagai kelas belajar, wahana Kerjasama, dan unit produksi. Kelompok tani bisa berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang beranggotakan petani secara perseorangan yang memiliki komoditas usaha tani yang sama.
5. Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) adalah kumpulan beberapa poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Tujuannya adalah memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain serta meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani, unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani/produksi, unit usaha pengelolaan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam) gapoktan. Gapoktan berbadan hukum dan beranggotakan petani yang tergabung di dalam poktan.

Pada berbagai jenis organisasi petani, peran komunikasi juga tidak bisa diabaikan karena merupakan hal yang sangat fundamental dalam upaya pembangunan di perdesaan. Hasil penelitian Kosasih et al. (2014) menemukan bahwa tingginya iklim komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai interaksi berkomunikasi pada gapoktan ternyata dapat berdampak pada kondisi dan suasana yang baik bagi pengurus gapoktan tersebut. Lebih lanjut, Kosasih menyebutkan bahwa gapoktan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor memiliki tingkat kepuasan komunikasi pada pengurus gapoktan yang tergolong tinggi. Hal ini berimplikasi pada adanya hubungan nyata antara komunikasi organisasi dalam pengembangan kinerja pengurus gapoktan dengan iklim komunikasi.

Selaras dengan hal tersebut, dikemukakan oleh Gandasari (2015) dalam penelitiannya bahwa komunikasi antar organisasi akan berlangsung efektif apabila organisasi petani juga berjalan efektif. Hal ini dapat membantu

proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi petani. Oleh karena itu, apabila fungsi komunikasi mengalami hambatan maka akan memengaruhi pengembangan organisasi petani tersebut. Artinya, fungsi komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan berbagai permasalahan serius dalam komunikasi di dalam organisasi petani maupun antar organisasi petani.

Hasil penelitian Khusna et al. (2018) menemukan bahwa peran penyuluh pertanian, antara lain sebagai komunikator, memiliki ciri sebagai fasilitator, edukator, mediator, motivator, serta beberapa elemen komunikasi seperti pesan, media, komunikasi, dan efek menjadi gambaran dari strategi komunikasi yang dilakukan. Besarnya kontribusi peran penyuluh dalam pengembangan usaha tani juga berkontribusi dan berdampak pada program pembangunan yang dikawalnya. Dapat dikatakan bahwa penyuluh harus mampu berkomunikasi dengan baik dalam mendiseminasikan berbagai inovasi dan teknologi pertanian kepada petani.

Jaringan Komunikasi dan Korporasi Petani

Penelitian Hapsari et al. (2018) menegaskan bahwa jaringan komunikasi diartikan sebagai seperangkat aktor yang mempunyai relasi dengan aktor lain dalam tipe relasi tertentu dan bisa dikaitkan juga dengan difusi inovasi. Pendefinisian yang sedikit berbeda dijelaskan oleh Hertanto et al. (2016) dimana jaringan komunikasi merupakan dimensi sosial kapital dan lebih menekankan pada aspek ikatan yang terbentuk dari sebuah hubungan antar orang atau kelompok. Artinya, jaringan komunikasi selain berkaitan dengan peran aktor secara individu juga terkait peran aktor di dalam sebuah kelompok atau organisasi.

Terdapat beberapa pendapat yang mengaitkan jaringan komunikasi dengan kelompok dan organisasi. Salah satunya, Siregar et al. (2020) yang menyebutkan bahwa jaringan komunikasi diartikan sebagai bentuk pola kontak antar individu dalam suatu kelompok atau organisasi yang tercipta serta dapat diidentifikasi melalui pertukaran pesan dengan pola tertentu. Hal ini menandakan bahwa jaringan komunikasi penting diamati agar dapat memahami fenomena interaksi manusia secara umum dalam sebuah sistem sosial, sehingga dapat juga mengidentifikasi struktur komunikasi yang menyusunnya. Selain itu, jaringan komunikasi juga dapat melihat sejauh mana proses difusi inovasi dan penerimaan inovasi di dalam masyarakat (Hapsari et al. 2018). Jaringan

komunikasi juga disebutkan sebagai model dari komunikasi konvergen dalam prakteknya sama dengan model komunikasi dengan mementingkan dialog di dalamnya (Siregar et al. 2020). Artinya, jaringan komunikasi dapat membentuk dialog yang bisa menghasilkan kesepakatan dalam sebuah organisasi. Bahkan, dikatakan pula bahwa jaringan komunikasi yang di dalamnya terdapat hubungan, berperan sebagai salah satu penentu keberhasilan sebuah kegiatan (Rattunde et al. 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan Dharmawan et al. (2019), terdapat rangkuman berbagai pendapat tentang analisis jaringan komunikasi yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi klik (jaringan komunikasi dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa anggota) dalam suatu sistem. Selain itu, penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui dan mengukur berbagai indikator struktur komunikasi (keterhubungan klik, keterbukaan klik, keintegrasian klik, dan lainnya) dan melihat peranan seseorang dalam sebuah jaringan komunikasi (seperti *opinion leader*, *liaisons*, *bridges* dan *isolate*). Jaringan komunikasi di dalam maupun luar kelompok (antar kelompok) merupakan salah satu hal yang penting dalam menyusun strategi pembangunan agribisnis (Andriani et al. 2021). Bahkan, dalam penelitian Andriani ini ditemukan bahwa dari analisis sosiogram pada agribisnis sayuran organik menunjukkan jaringan komunikasi memiliki struktur personal yang menyebar memusat (*interlocking personal network*). Pola ini memungkinkan klik dapat terjadi karena daerah tempat tinggal petani saling berjauhan dan kemampuan yang dimiliki petani dalam melakukan akses terhadap sumber-sumber informasi berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa petani yang aktif mencari informasi, serta mampu memasarkan produknya langsung ke pasar ritel modern adalah petani yang memiliki kapasitas tinggi. Sedangkan, bagi petani yang memiliki kapasitas tergolong sedang, kecenderungan relasi hanya sebatas komunitasnya saja. Dengan kata lain, jaringan komunikasi personal di dalam kelompok maupun luar kelompok dapat menunjang keberlanjutan dari usaha tani, karena petani lebih dekat dengan akses informasi yang membantu usaha taninya.

Hasil penelitian yang sama menemukan bahwa jaringan komunikasi membantu untuk mentransfer informasi pertanian melalui interaksi sosial petani, sehingga dapat memengaruhi petani dalam mencari informasi tentang usaha taninya (Pratiwi dan Suzuki 2017). Oleh sebab itu, untuk membangun pertanian yang efektif dan

efisien dengan cara pemanfaatan berbagai sumber informasi teknologi maka diperlukan peran jaringan komunikasi (Rangkuti 2009). Senada dengan hal tersebut, hasil penelitian Wahyuni (2017) dan Sulistiawati (2018) menyebutkan bahwa jaringan komunikasi dapat memengaruhi kapasitas petani dan jumlah anggota kelompok. Hal ini memperlihatkan bahwa jaringan komunikasi dapat membantu petani meningkatkan kompetensinya. Dengan demikian, petani lain dapat termotivasi untuk bergabung di dalam sebuah wadah kelompok. Oleh karena itu, jaringan komunikasi sangat penting dalam sebuah proses diseminasi inovasi dan teknologi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebuah kajian dari Setyani et al. (2021) menyimpulkan bahwa dalam sebuah jaringan antar petani, komunikasi akan menjadi kurang erat apabila terdapat anggota petani yang tidak tergabung di dalam klik pada kelompoknya sehingga hanya didominasi oleh orang-orang tertentu. Artinya, interaksi antar kelompok menjadi kunci dalam dinamika sebuah organisasi serta menjadi perekat hubungan antar anggota kelompok. Organisasi yang proses interaksinya hanya didominasi orang-orang tertentu akan membuat hubungan menjadi tidak *equal*, sehingga berpengaruh pada keakraban bahkan kepercayaan yang tercipta di dalamnya.

Jaringan komunikasi juga berkaitan erat dengan proses penyebaran informasi. Hal ini diperkuat dengan pendapat Crawford et al. (2015) bahwa jaringan komunikasi menjadi salah satu sumber informasi yang paling efektif bagi petani. Melalui jejaring informasi, petani memperoleh banyak informasi untuk usaha taninya dan dapat menyebarkannya ke dalam organisasinya sendiri. Dalam sebuah kasus disimpulkan bahwa anggota organisasi petani akan memiliki keterkaitan tertinggi dengan aktor yang memiliki posisi yang paling disukai. Sehingga, banyak aktor lain yang bergantung dan berusaha menjalin hubungan dengan aktor tersebut dalam sebuah jaringan sosial (Haldar et al. 2016). Keberadaan dan posisi aktor dalam jaringan sangat memengaruhi kepada siapa petani akan berbagi informasi dan mencari informasi yang tepat. Beberapa hasil kajian mempertegas bahwa jaringan sangat erat kaitannya dengan organisasi petani baik dari peran aktor maupun dari fungsi jaringan itu sendiri.

Peran Jaringan Komunikasi dalam Pengembangan Korporasi Petani

Jaringan komunikasi memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi petani. Salah satunya sebagai bentuk interaksi sosial dan berdampak pada perkembangan suatu bisnis organisasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Ellyta (2017) yang menyebutkan bahwa perilaku petani dalam pemasaran komoditas pertanian berhubungan dengan keikutsertaan petani dalam jaringan komunikasi. Kajian yang dilakukan pada pemasaran lidah buaya di Kalimantan Barat ini menghasilkan kesimpulan, yaitu semakin banyak petani yang terpapar media maka semakin tinggi keikutsertaan petani dalam jaringan komunikasi. Sedangkan, perilaku petani dalam pemasaran lidah buaya dipengaruhi oleh keikutsertaan petani dalam jaringan komunikasi. Oleh karena itu, semakin tinggi keterlibatan petani dalam jaringan komunikasi maka akan berpengaruh pada perilaku petani sehingga menjadi semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pengetahuan petani pada aspek pemasaran lidah buaya.

Jaringan komunikasi juga dinilai berpengaruh terhadap proses pergantian keanggotaan dan kinerja kelompok (Argote et al. 2018). Hal ini dikenakan adanya sentralisasi dan kepadatan jaringan yang dapat memengaruhi jalur komunikasi dan kejelasan koordinasi. Sebagai contoh, ketika pergantian pengurus atau keanggotaan kelompok yang terhubung (kepadatan tinggi) secara penuh, justru cenderung mengabaikan anggota baru yang belum memahami koordinasi dalam kelompok atau perannya di dalam kelompok. Pada kelompok terpusat dengan sentralitas yang tinggi, sarana koordinasi sebagian besar ditentukan oleh struktur komunikasi, yaitu peran aktor yang paling dominan dalam kelompok. Di samping itu, hasil penelitian Sulistiawati (2018) menemukan hal yang sedikit berbeda, bahwa tingkat kepadatan dalam jaringan komunikasi kelompok tergantung pada jumlah anggota kelompok sedangkan kelompok dengan derajat sentralitas paling tinggi maka paling sedikit memiliki anggota yang menjadi *isolate*. Kedua hasil penelitian ini mengambil hasil positif dan negatif dari tingginya kepadatan dan sentralitas. Artinya, kepadatan dan sentralitas yang tinggi dapat berdampak positif maupun negatif apabila dilihat dari berbagai sudut pandang dan kepentingan yang berbeda.

Hasil penelitian Kim et al. (2019) menemukan bahwa anggota kelompok yang memiliki pengaruh di dalam jaringan dengan ciri-cirinya dijelaskan sebagai berikut.

1. Menggunakan jaringan digunakan untuk berbagi informasi;

2. Menyebarkan informasi mengenai proyek atau program kepada khalayak ramai;
3. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami secara lokal hingga kelompok besar;
4. Memiliki nilai persahabatan sehingga dianggap ramah oleh sejumlah besar orang; dan
5. Memperoleh kepercayaan dari sebagian besar anggota.

Fungsi jaringan komunikasi dalam sebuah organisasi dapat dilihat juga dari perannya sebagai penyampai informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Paswan et al. (2018) bahwa jaringan komunikasi memainkan peran penting dalam berbagi informasi di masyarakat perdesaan. Hal ini dikarenakan informasi merupakan salah satu hal yang sangat berguna dalam menopang mata pencaharian. Paswan juga menambahkan bahwa kerabat, teman, dan tetangga adalah bagian penting dari jaringan yang berpengaruh pada sumber informasi sehingga dapat memengaruhi adopsi dan difusi teknologi (Paswan et al. 2018). Di bidang pertanian, penyampai informasi sering kali dikaitkan dengan peran penyuluh sebagai ujung tombak dari introduksi inovasi dan teknologi kepada petani di lapangan.

Para penyuluh profesional memiliki gagasan tentang bagaimana informasi pertanian mengalir dalam suatu jaringan. Penyuluh juga hendaknya memahami peran penting dari simpul-simpul jaringan penting (aktor penting) dari jaringan komunikasi antar aktor. Penyuluh juga berperan penting dalam mengoptimalkan sumber daya dalam proses difusi. Hasil penelitian Paswan et al. (2018) menemukan bahwa Jaringan informasi pada masyarakat bawah yang direncanakan dengan baik dapat menjadi masukan penting bagi lembaga penyuluhan dalam menjangkau kegiatan pembinaan penyuluhan secara lebih efisien. Oleh karena itu, penyuluh dan lembaga penyuluhan harus berperan penting dan optimal dalam memberikan informasi kepada petani. Di samping itu, penyuluh tidak mengabaikan peran petani di dalam kelompok yang akan menerima informasi dan inovasi yang diintroduksikan karena dapat memengaruhi percepatan proses difusi inovasi dalam sebuah organisasi petani. Dengan demikian, petani perlu meningkatkan kapasitasnya agar memiliki nilai sentralitas tinggi dalam kelompok yang dapat memperkuat penyebaran informasi dalam jaringan sosial (Haldar et al. 2016).

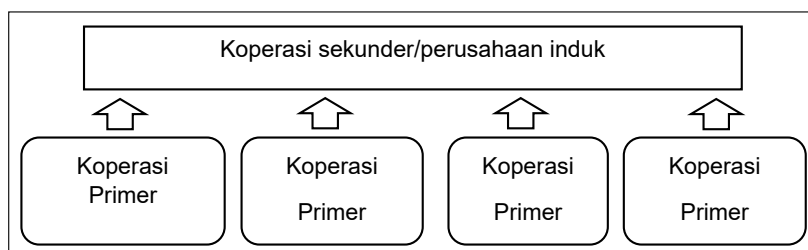
Pada kelompok dengan skala ekonomi cukup luas seperti korporasi petani, terdapat pendekatan yang harus dilakukan untuk

mentransformasi kelompok tani maju menjadi korporasi petani. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan melalui intervensi pemerintah dalam pengurusan legalitas usaha dan memberikan arahan untuk mengembangkan usaha (Tan dan Mailena 2021). Dapat dikatakan bahwa aspek bisnis begitu ditekankan dengan dibentuknya korporasi petani. Untuk memperkuat hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas petani dalam hal manajerial. Selanjutnya, pemerintah harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam setiap program yang dicanangkan, untuk memberdayakan petani, khususnya pengembangan korporasi petani yang cukup masif saat ini.

Dalam *grand design* pengembangan korporasi petani yang dirancang oleh Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa korporasi petani dibentuk dan dimiliki bersama oleh petani berskala usaha kecil yang tergabung di dalam Poktan dan Gapoktan. Setelah usaha yang dilakukan koperasi tersebut berkembang, maka diharapkan akan mampu bertransformasi menjadi koperasi produsen primer, Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)/Kelompok Usaha Bersama (KUB), atau bidang usaha yang bergerak di bidang pengadaan prasarana dan sarana usaha tani, usaha produksi, dan pemasaran hasil usaha tani (Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2019). Selain itu, disebutkan bahwa korporasi petani bisa dikembangkan menjadi tiga model, yaitu (1) korporasi petani berbasis koperasi; (2) korporasi petani berbentuk Perseroan Terbatas (PT); dan (3) kombinasi kedua model (model 1 dan 2) dengan adanya keterpaduan model.

Hasil penelitian Suharyono et al. (2021) pada korporasi kentang di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah menggambarkan struktur korporasi petani yang cukup sederhana, namun dapat menopang berbagai kebutuhan petani kentang yang tergabung di dalam korporasi petani. Penelitian ini menggunakan model pengembangan korporasi petani yang berbasis koperasi. Pengembangan setiap koperasi primer yang sudah dibentuk diharapkan dapat menopang tumbuhnya korporasi petani. Dalam hal ini, korporasi petani membutuhkan peran serta *stakeholders* agar pengembangan korporasi petani dan unit bisnisnya dapat berkembang sesuai harapan petani. Struktur korporasi petani dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Penelitian Suharyono et al. (2021) menemukan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian, berkontribusi dalam memperkuat posisi tawar petani dengan cara memotivasi petani untuk tidak melakukan



Sumber: Suharyono et al. (2021)

Gambar 1. Desain struktur korporasi petani kentang di Kecamatan Batur, 2021

transaksi secara individu, tetapi melalui koperasi untuk memotong rantai pasok. Hal demikian ternyata memberikan dampak positif bagi petani, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai ekonomi yang diperoleh setiap petani kentang dengan adanya korporasi berkisar antara Rp1,04–2,07 juta per tahun. Angka tersebut cukup besar mengingat dulunya petani masih mengalami kesulitan dalam hal pemasaran dan sering mengalami kerugian.

Di lokasi penelitian yang berbeda, Haryanto et al. (2022) menemukan bahwa salah satu kekuatan yang dimiliki oleh korporasi petani adalah kemampuannya dalam menjembatani kebutuhan petani dan keinginan pemangku kepentingan. Sedangkan, pada aspek profitabilitas ada pada jenis usaha dan pendapatan kelompok. Dari penelitian ini ditemukan bahwa untuk menjawab permasalahan korporasi petani, maka harus memerhatikan berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, teknis, manajerial, sosial, Pendidikan, dan aspek profitabilitas (Haryanto et al, 2022). Berdasarkan hasil model pengukuran, didapatkan bahwa variabel yang berpengaruh kuat dalam karakter kelembagaan untuk menunjang kemandirian dan ketahanan pangan adalah aspek sosial dan dan aspek profitabilitas. Kedua aspek ini menjadi penciri utama dalam karakter kelembagaan KEP. Aspek sosial terdiri dari pengembangan masyarakat pada aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek organisasi, dan pembangunan pertanian. Secara keseluruhan, keenam indikator performa kelembagaan ini dapat menjadi penciri karakter kelembagaan KEP di lokasi *food estate* yang kuat dan perlu dimiliki untuk bisa menjadi pemicu dalam menggerakkan percepatan pengembangan kawasan pertanian.

Peran *stakeholders* tergambar jelas dalam penelitian Pratiwi et al. (2022). Disebutkan bahwa kinerja pelaksanaan korporasi petani terbagi menjadi tiga *stakeholders* utama sebagai berikut.

1. Bagi petani berupa hasil dari kegiatan pendampingan yang memberikan dampak positif terutama dalam penerapan teknologi

spesifik lokasi usaha tani padi. Bahkan juga berdampak pada peningkatan produksi, yaitu mencapai 2–3 ton/ha.

2. Bagi Pemerintah dalam hal ini Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang sebelumnya bernama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Dinas Pertanian Takalar, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Polut, Perusahaan Benih, program percontohan di Sulawesi Selatan sebagai lokasi penelitian juga berjalan dengan baik, dan Dinas Pertanian setempat yang mendampingi proses kerjasama dengan mitra perusahaan benih. Namun, dari sisi pemeliharaan program untuk Dinas Pertanian dan BPP Polut sejauh ini belum terlaksana dengan baik.
3. Pihak swasta (mitra) seperti perusahaan benih (sebagai pemasok benih) dan pasar bagi produk petani, namun kemitraan lainnya belum terbentuk.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaringan komunikasi dalam korporasi petani dapat berjalan dengan baik apabila terjadi koordinasi yang baik pula di antara *stakeholders* yang terlibat di dalam korporasi petani. Sementara itu, proses komunikasi pada jaringan komunikasi merupakan proses komunikasi dua arah dan interaktif di antara individu atau kelompok yang terlibat. Dalam hal ini, komunikasi diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan para partisipan dalam membuat jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi menekankan adanya dialog yang baik dan dapat dimaknai secara bersama. Dengan demikian, untuk memperkuat sebuah korporasi petani, maka pemerintah juga harus memperkuat jaringan komunikasi, baik itu di dalam korporasi petani maupun di luar korporasi petani. Jejaring yang dibentuk dapat mempermudah dalam mempertemukan petani dan pemangku kepentingan yang terlibat seperti *stakeholders* yang saling berhubungan untuk pengembangan korporasi petani tersebut. Bentuk keterlibatannya bisa berupa partisipasi dalam membantu terlaksanakannya program kegiatan korporasi petani. Menurut Demiryurek (2010),

berkurangnya kerjasama *stakeholders* dapat dilihat dari lemahnya interaksi antar anggota kelompok yang dipengaruhi oleh jaringan komunikasi.

Peran jaringan komunikasi yang baik antar petani dan *stakeholders* sangat diperlukan dalam pengembangan korporasi petani. Dengan demikian, pemerintah dan pemangku kepentingan yang terlibat dapat mengetahui lebih lanjut peran masing-masing petani dan *stakeholders* dalam sebuah jaringan komunikasi pada korporasi petani. Secara tidak langsung hal ini dapat mengevaluasi kinerja sebuah korporasi petani melalui kondisi struktur jaringan dan peran *stakeholders* yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, apabila dilakukan penelaahan lebih dalam bisa memberikan kontribusi bagi berjalannya sebuah korporasi petani dan mengetahui kelemahan dan kelebihan, sehingga bisa menemukan strategi yang baik untuk mengembangkan korporasi petani. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan korporasi, petani harus bekerja secara kolektif. Hal tersebut bahkan dapat mempermudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi petani (Muriqi et al. 2021).

Adapun salah satu solusi yang tepat untuk memperkuat korporasi petani, antara lain dengan mengoptimalkan peran jaringan komunikasi dalam korporasi petani maupun *stakeholders*. Menurut Sumardjo et al. (2023), solusi yang diberikan untuk pengembangan korporasi dapat menggunakan konsep sinergi kemitraan antara petani dengan pelaku usaha lokal serta pelaku swasta. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan korporasi tidak bisa berjalan sendiri karena membutuhkan peran komunikasi dalam bentuk dialog agar proses kolaborasi dapat berlangsung secara terus-menerus. Peran *stakeholders* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan berkolaborasi secara baik dapat memberikan dampak yang positif pula bagi pengembangan korporasi di masa yang akan datang.

PENUTUP

Keberadaan korporasi petani yang dikembangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dapat memberikan solusi bagi permasalahan petani dalam usaha taninya dan dapat mengoptimal kegiatan usaha dari hulu hingga hilir. Meskipun pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan korporasi petani dalam hal

komunikasi, pemerintah tetap mengupayakan pengembangan korporasi menjadi masif di Indonesia. Komunikasi berperan penting dalam menyampaikan informasi dan teknologi inovatif yang merupakan bagian penting dalam keberlangsungan korporasi petani. Keberlangsungan korporasi petani juga dipengaruhi oleh jaringan komunikasi di dalamnya.

Jaringan komunikasi merupakan kontak antar individu di dalam sebuah kelompok yang dapat melihat proses difusi inovasi dan siapa saja yang menerima inovasi, membentuk dialog, dan menghasilkan kesepakatan. Jaringan komunikasi juga berguna dalam menentukan strategi pembangunan agribisnis, mengetahui jaringan komunikasi yang terjadi di dalam sebuah kelompok dalam sebuah sistem, dan struktur komunikasi. Selain itu, jaringan komunikasi dapat menunjang keberlanjutan usaha tani, mendekatkan dengan sumber informasi, dan mentransfer informasi melalui interaksi sosial. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengaktifkan peran penyuluh yang berpengaruh terhadap kapasitas petani.

Upaya pengembangan korporasi petani di Indonesia membutuhkan jaringan komunikasi yang erat antar petani. Sehingga, optimasi peran petani, pemerintah, dan *stakeholders* maupun fungsi jaringan itu sendiri dapat dicapai. Jaringan komunikasi juga berperan penting dalam pengembangan korporasi petani dengan memperkuat interaksi sosial, kinerja kelompok, dan perkembangan bisnis. Jaringan komunikasi dalam korporasi petani dapat berjalan dengan baik apabila terjadi koordinasi antar petani, pemerintah, dan *stakeholders* yang terlibat di dalam korporasi petani. Selain itu, dalam pengembangan korporasi pemerintah dan *stakeholders* perlu diperhatikan berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, teknis, manajerial, sosial, pendidikan, dan aspek profitabilitas. Dengan demikian, korporasi petani memerlukan jaringan komunikasi yang mengedepankan konsep sinergi kemitraan. Dimana, pengembangan korporasi membutuhkan peran komunikasi dalam bentuk dialog agar proses kolaborasi dapat berlangsung secara terus-menerus.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah jaringan komunikasi antar petani, pemerintah, dan *stakeholders* yang terlibat dalam korporasi petani harus diperkuat. Selain itu, korporasi petani membutuhkan peran penyuluh, pemerintah, dan *stakeholders* untuk menyampaikan beragam informasi sebagai upaya meningkatkan kapasitas petani. Selanjutnya, baik itu petani, pemerintah, maupun *stakeholders* perlu meningkatkan peran jaringan

komunikasi berupa dialog dan kolaborasi aktif dari semua pihak sebagai upaya pengembangan korporasi petani dan unit bisnisnya untuk saat ini dan masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir Sumardjo M.S., Dr. Ir. Djuara P. Lubis M.S., dan Dr. Ir Syahyuti, M.Si. yang telah membantu dan membimbing penulisan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih instansi tempat penulis bekerja, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia RM, Sarwoprasodjo S, Fitri R. 2017. Komunikasi partisipatif dan jaringan komunikasi dalam membangun aksi kolektif Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) di daerah irigasi papah. *Jurnal Komunikasi Pembangunan* [Internet]. [diunduh 2023 August 16]; 15(1):15–29. Tersedia dari: doi:10.46937/15201722760.
- Anandita DA, Patria KZ. 2017. Agriculture challenges: decline of farmers and farmland (study from Indonesian family life survey). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* [Internet]. [diunduh 2023 August 17]; 16(1):48–53. Tersedia dari: doi:10.20961/jiep.v16i1.2314.
- Andriani R, Kusumo B, Charina A. 2021. Analisis jaringan komunikasi pada agribisnis sayuran organik di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Penyuluhan* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 05]; 17(2):206–217. Tersedia dari: doi:10.25015/17202132788.
- Argote L, Aven BL, Kush J. 2018. The effects of communication networks and turnover on transactive memory and group performance. *Journal Organization Science*. [Internet]. [cited 2023 August 17]; 29(2):1–17. Available from: doi:10.1287/orsc.2017.1176.
- Bakri S, Zain MM, Baso AKT, Syafar AAR, Novita D, Arsyad M. 2020. Small scale corporate model and rice farming efficiency. *IOP Conf Ser Earth Environ Sci* [Internet]. [cited 2023 August 17]; 575:1–5. Available from: doi:10.1088/1755-1315/575/1/012100.
- Crawford C, Grossman J, Warren ST, Cabbage F. 2015. Grower communication networks: information sources for organic farmers. *The Journal of Extension* [Internet]. [cited 2023 August 18]; 53(3):54–69. Available from: <https://archives.joe.org/joe/2015june/a9.php>.
- Demiryurek K. 2010. Analysis of information systems and communication networks for organic and conventional hazelnut producers in The Samsun Province of Turkey. *Journal Agricultural Systems* [Internet]. [cited 2023 August 18]; 103(7):444–452. doi:10.1016/j.agry.2010.04.002. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.agry.2010.04.002>.
- Dharmawan L, Firmansyah A, Susanto T. 2019. Komunikasi inovasi dalam pemanfaatan lahan pekarangan komunitas petani untuk mewujudkan kemandirian pangan di era digital. *Jurnal Komunikasi Pembangunan* [Internet]. [diunduh 2023 August 02]; 17(1):55–68. Tersedia dari: doi:10.29244/jurnalkmp.17.1.55-68.
- Effendy L, Mustofa R. 2020. Model pengembangan kelembagaan petani menuju kelembagaan ekonomi petani. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* [Internet]. [diunduh 2023 September 02]; 6(1):38–47. Tersedia dari: <http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v6i1.492>
- Ellyta E. 2017. Jaringan komunikasi petani dalam pemasaran lidah buaya di Kalimantan Barat. *Jurnal Zira'ah* [Internet]. [diunduh 2023 August 02]; 42(1):30–39. Tersedia dari: <https://www.neliti.com/id/publications>.
- Fahmid IM, Wahyudi W, Agustian A, Aldillah R, Gunawan E. 2022. The potential swamp land development to support food estates programmes in Central Kalimantan, Indonesia. *Journals Environment and Urbanization ASIA* [Internet]. [cited 2023 August 02]; 13(1):1–12. Available from: doi:10.1177/09754253221078178.
- Flor AG, Ongkiko IVC, Lubis DP. 2022. Pengantar komunikasi pembangunan. Jakarta (ID): IPB Press.
- Gandasari D, Sarwoprasodjo S, Ginting B, Susanto D. 2015. Proses kolaboratif antar pemangku kepentingan pada konsorsium anggrek berbasis komunikasi. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* [Internet]. [diunduh 2023 August 02]; 31(1):81–91. Tersedia dari: doi:10.29313/mimbar.v31i1.1109.
- Geburu KM, Rammelt C, Leung M, Zoomers A, van Westen G. 2021. The commodification of social relationships in agriculture: evidence from Northern Ethiopia. *Journal Geoforum* [Internet]. [cited 2023 Sept 02]; 126:350–360. doi:10.1016/j.geoforum.2021.07.026. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.07.026>.
- Gultom IA, Puspa AK, Dharmawan YY, Subing A. 2020. Analisis perencanaan sektor pertanian berbasis korporasi. *Jurnal Manajemen Visionist* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 23]; 9(2):16–20. Tersedia dari: doi:10.36448/jmv.v9i2.1796.
- Haldar S, Misra S, Pal S, Basu D, Goswami R. 2016. Understanding agricultural information networks in West Bengal, India. *Indian Research Journal of*

- Extension Education [Internet]. [cited 2023 Sept 02]; 16(1):25–34. Available from: <https://seea.org.in/uploads/pdf/v16104.pdf>.
- Hapsari DR, Sarwono BK, Eriyanto E. 2018. Jaringan komunikasi dalam partisipasi gerakan sosial lingkungan: studi pengaruh sentralitas jaringan terhadap partisipasi gerakan sosial tolak pabrik semen pada Komunitas Adat Samin di Pati Jawa Tengah. *Jurnal Komunikasi Indonesia* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 23]; 6(2):120–128. Tersedia dari: doi:10.7454/jki.v6i2.8712.
- Harjanto P, Fahmid I, Ali S, Demmallino E. 2022. Institutional development of farmers through agricultural area-based corporations in Indonesia. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [Internet]. [cited 2023 Sept 15]; Vol. 1114. p. 1–8. Available from: doi:10.1088/1755-1315/1114/1/012039
- Haryanto Y, Rusmono M, Aminudin A, Purboingtyas TP, Gunawan G. 2022. Analisis penguatan kelembagaan ekonomi petani pada komunitas petani padi di lokasi *Food Estate*. *Jurnal Penyuluhan* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 23]; 18(2):323–335. Tersedia dari: doi:10.25015/18202241400.
- Haryanto Y, Yuniarti W. 2023. Kelembagaan petani. Warnaen A, editor. Makassar (ID): Tohar Media.
- Hertanto D, Sugiyanto S, Safitri R. 2016. Analisis struktur jaringan komunikasi dan peran aktor dalam penerapan teknologi budidaya kentang (petani kentang desa Ngantru kecamatan Ngantang kabupaten Malang). *Jurnal Habitat* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 23]; 27(2):55–65. Tersedia dari: doi:10.21776/ub.habitat.2016.027.2.7.
- Hisano S, Akitsu M, McGreevy SR. 2018. Revitalising rurality under the neoliberal transformation of agriculture: experiences of reagrarianisation in Japan. *J Rural Stud* [Internet]. [cited 2023 Sept 02]; 61(18):290–301. Available from: doi:10.1016/j.jrurstud.2018.01.013.
- Iskandar MJ, Jamhari J. 2020. Efficiency of rice farming in the corporate farming model in Central Java. *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* [Internet]. [cited 2023 August 13]; 6(2):154–167. Available from: doi:10.18196/agr.6298.
- [KEMANTAN] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2019. *Grand Design* pengembangan korporasi petani sebagai penggerak ekonomi kawasan pertanian untuk kesejahteraan petani. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia. [Internet]. [diunduh 2023 Juli 19]. Tersedia dari: <https://repository.pertanian.go.id/items/6c5ed722-f21c-42c6-9689-bd5100b85995>.
- Khusna NA, Erawan E, Arsyad AW. 2018. Strategi komunikasi petugas penyuluhan pertanian dalam meningkatkan hasil komoditas tanaman padi pada Kelompok Tani Purwa Jaya Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Ejournal Ilmu Komunikasi* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 13]; 6(4):299–313. Tersedia dari: <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/>.
- Kim DH, Lee EK, Kim J. 2019. Experiencing LoRa network establishment on a smart energy campus testbed. *Journal Sustainability (Switzerland)* [Internet]. [cited 2023 August 25]; 11(7):1–32. Available from: doi:10.3390/su11071917.
- Kosasih DE, Sarwoprasodjo S, Susanto D. 2014. Komunikasi organisasi dalam pengembangan kinerja pengurus gapoktan pada program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (kasus pada gapoktan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor). *Jurnal Komunikasi Pembangunan* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 13]; 12(2):92–102. Tersedia dari: doi:<https://doi.org/10.46937/1220148665>.
- Littlejohn SW, Foss KA. 2018. *Encyclopedia of Communication Theory*. Washington DC (AS): SAGE Publications, Inc.
- Lubis DP. 2015. Pola-pola komunikasi. In: Nasdian FT, editor. *Sosiologi Umum*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Luna P. 2020. Pengembangan demo farm pertanian korporasi di Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang. Bogor (ID).
- Mariyani S, Pandjaitan NK, Sihaloho M. 2022. Peran kelembagaan pangan komunitas petani sawah tadah hujan di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Agrimanex* [Internet]. [diunduh 2023 August 25]; 2(2):142–153. Tersedia dari: doi:<https://doi.org/10.35706/agrimanex.v2i2.6361>.
- Muriqi S, Baranyai Z, Fekete-Farkas M. 2021. Comparative analysis of cooperative and non-cooperative farmers in Kosovo. *Journal Economics and Sociology* [Internet]. [cited 2023 Juli 16]; 14(3):242–263. Available from: doi:10.14254/2071-789X.2021/14-3/13.
- Nisma A, Sriati S, Najib A, Maryadi M. 2017. Potential for revitalization of institutional rice farming ecosystem with Ing In The Ogan Komering Ilir District of South Sumatra Province. *Journal Rjoas* [Internet]. [cited 2023 August 26]; 66(6):315–322. Available from: doi:<https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-06.37> POTENTIAL.
- Paswan A, Aditya, Basu D. 2018. Diffusion of agricultural technologies through social network analysis in selected villages of Bihar, India. *Journal of Global Communication* [Internet]. [cited 2023 Juli 22]; 11(1):24–32. Available from: doi:10.5958/0976-2442.2018.00003.4.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2018. Permentan No 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. [Internet]. [diunduh 2023 Juli 19]; hlm 1–25.
- Pratiwi A, Suzuki A. 2017. Effects of farmers' social networks on knowledge acquisition: lessons from agricultural training in rural Indonesia. *J Econ*

- Struct [Internet]. [cited 2023 Sept 26]; 6(1):1–23. Available from: doi:10.1186/s40008-017-0069-8.
- Pratiwi M, Darma R, Mahyuddin M. 2022. Implementation of corporate farming program on rice farming (case study on farmer group Semangat 45). *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology* [Internet]. [cited 2023 Sept 26]; 7(1):39–47. Available from: doi:10.22161/ijeab.
- Ramadhani RW, Prihantoro E. 2020. Strategi komunikasi pembangunan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan nawacita dan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 13]; 18(2):117–129. Tersedia dari: doi:10.46937/18202028913.
- Rangkuti PA. 2009. Analisis peran jaringan komunikasi petani dalam adopsi inovasi traktor tangan di kabupaten Cianjur, Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi* [Internet]. [diunduh 2023 Juli 19]; 27(1):45–60. Tersedia dari: doi:10.21082/jae.v27n1.2009.45-60.
- Rattunde F, Weltzien E, Sidibé M, Diallo A, Diallo B, Brocke K vom, Nebié B, Touré A, Traoré Y, Sidibé A, et al. 2021. Transforming a traditional commons-based seed system through collaborative networks of farmer seed-cooperatives and public breeding programs: the case of sorghum in Mali. *Journal Agriculture and Human Values* [Internet]. [cited 2023 Sept 26]; 38(1):561–578. Available from: doi:10.1007/s10460-020-10170-1. https://doi.org/10.1007/s10460-020-10170-1.
- Rogers EM, Kincaid DL. 1981. *Communication networks: toward a new paradigm for research*. New York (US): The Free Press.
- Sari YKP, Kumalasari RD, Zunaidah A. 2021. Social economic impact of communication network pattern of rural women community in Malang regency. In: *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* [Internet]. [cited 2023 Sept 26]; p. 748–757. Available from: https://www.ieomsociety.org/proceedings/2021india/221.pdf
- Servaes J, Lie R. 2008. *Communication for development and social change*. 1st ed. New Delhi (IND): SAGE Publications India Pvt Ltd.
- Setyani DA, Padmaningrum D, Permatasari P. 2021. Jaringan komunikasi petani dalam program kartu tani di Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. *Agrovital: Jurnal Ilmu Pertanian* [Internet]. [diunduh 2023 Juli 9]; 6(1):4–9. Tersedia dari: doi:http://dx.doi.org/10.35329/agrovital.v6i1.1997.
- Siregar NI, Sadono D, Wibowo CT. 2020. Analisis jaringan komunikasi kelompok tani dalam penerapan budidaya padi metode system of rice intensification (SRI). *JURNAL PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)* [Internet]. [diunduh 2023 August 22]; 21(1):1–14. Tersedia dari: doi:https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i1.2216.
- Simamora PRT. 2021. *Komunikasi Organisasi*. Ed ke-1. Jakarta (ID). Yayasan Kita Menulis.
- Sjaf S, Arsyad AA, Mahardika AR, Gandi R, Elson L, Hakim L, Barlan ZA, Utami RB, Muhammad B, Amongjati SA, et al. 2022. Partnership 4.0: smallholder farmer partnership solutions. *Journal Heliyon* [Internet]. [cited 2023 Sept 26]; 8(12):1–16. Tersedia dari: doi:http://dx.doi.org/10.35329/agrovital.v6i1.1997.
- Snyder H. 2019. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *J Bus Res* [Internet]. [cited 2023 Sept 26]; 104:333–339. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
- Suharyono S, Yofa R, Ar-Rozi A, Azis M, Yusuf E, Syahyuti S. 2021. The development of farmers cooperative in the potato agribusiness system in Batur subdistrict, Banjarnegara. In: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* [Internet]. [cited 2023 August 07]; p. 1–8. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- Sulistiawati A. 2018. Analisis jaringan komunikasi tingkat kelompok dalam gapoktan. In: *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* [Internet]. [diunduh 2023 September 25]. Vol. 2(2): 155–168. Tersedia dari: https://doi.org/10.29244/jskpm.2.2.155-168.
- Sumardjo S, Firmansyah A dan Dharmawan L. 2023. Social transformation in peri-urban communities toward food sustainability and achievement of SDGs in the era of disruption. *J Sustainability* [Internet]. [cited 2023 August 07]; 15: 1-17. Available from: doi: 10.3390/su151310678.
- Syahyuti S. 2014. *Mau ini apa itu?* Jakarta (ID): PT. Nagakusuma Media Kreatif.
- Syahyuti S, Gunawan E, Ashari A, Rina D Y. 2020. *Korporasi petani*. Ed ke-1. Bogor (ID): Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian [Internet]. [diunduh 2023 August 01]; Tersedia dari: http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/14871.
- Tan SS, Mailena L. 2021. Empowerment of farmers toward corporate implementation. In: *E3S Web of Conferences* [Internet]. [cited 2023 Sept 15];. 232. p. 1–10. Available from: https://www.researchgate.net/publication/348747172_Empowerment_of_Farmers_toward_Corporate_Implementation.
- [UUD] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2006. Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- [UUD] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2012. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Shinta Anggreany, Sumardjo, Juara Lubis, Syahyuti

- [UUD] Undang-Undang Negara Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani
- [UUD] Undang-Undang Negara Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Wahyuni S, Sumardjo S, Lubis DP, Sadono D. 2017. Hubungan jaringan komunikasi dan dinamika kelompok dengan kapasitas petani dalam agribisnis padi organik di Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 22]; 13(1):110–120. Available from: doi:<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.15115>.
- Wang H, Sarkar A, Qian L. 2021. Evaluations of the roles of organizational support, organizational norms and organizational learning for adopting environmentally friendly technologies: a case of kiwifruit farmers' cooperatives of meixian, China. *Journal Land* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 22]; 10(3):1–23. Available from: doi:[10.3390/land10030284](https://doi.org/10.3390/land10030284). <https://www.mdpi.com/2073-445X/10/3/284>.
- Werti A, Koestiono D, Muhaimin A. 2020. Comparison of production levels and rice farming income using technology and corporate farming (case study in gapoktan tani Mandiri Dalangan village, Tawangsari district, Sukoharjo regency, Central Java). *Journal Habitat* [Internet]. [diunduh 2023 Sept 26];. 31(3):144–148. Available from: doi:[10.21776/ub.habitat.2020.031.3.17](https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2020.031.3.17).
- Yulida R, Rosnita R, Andriani Yulia, Ikhwan Muhammad. 2021. Communication networks of on-farm rubber in Riau province, Indonesia. In: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. p. 1–13. Available from: <https://doi.org/10.25299/ijmcr.v2i1.6199>